



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR
DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL
GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan memfasilitasi akses masuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*) pada tanggal 21 Agustus 2019 di Bali, Indonesia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2019 di Bali, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial, selanjutnya disebut "**Para Pihak**";

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerja sama yang terjalin antara kedua negara dan rakyatnya;

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan baik secara timbal balik dengan memfasilitasi pergerakan warga negara, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas ke wilayah masing-masing negara Pihak lainnya;

MENGHORMATI Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah Pihak lainnya, untuk jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (istilah "anggota keluarga" merujuk pada suami/istri, anak-anak yang belum menikah dan belum bekerja yang berusia kurang dari 25 tahun dan orang tua yang menjadi tanggungannya) berkewajiban untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari kementerian luar negeri Pihak lainnya melalui misi diplomatik atau konsuler, sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4
SYARAT MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, dapat masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali yang disebutkan dalam ketentuan terkait keamanan, migrasi, bea cukai, kebersihan, serta ketentuan lain yang berlaku bagi pemegang paspor yang sah dimaksud.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara masing-masing Pihak dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya saat memasuki wilayah negara Pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan perundang-undangan mengenai masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak akan memengaruhi hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku di kedua negara yang berkaitan dengan keamanan internal dan pengaturan masuk, tinggal, atau pergerakan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk, mempersingkat, atau mengakhiri masa tinggal setiap orang yang disebutkan pada Pasal 1 Persetujuan ini di wilayah negaranya masing-masing, apabila orang tersebut dianggap tidak diinginkan atau dianggap membahayakan kedamaian masyarakat umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau keamanan nasional.

PASAL 6
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh paspor diplomatik dan paspor dinas mereka yang sah melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru serta modifikasi terhadap jenis yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan menyampaikan contohnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak mengalami kehilangan atau kerusakan paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah di wilayah Pihak lainnya, yang bersangkutan wajib segera memberitahukan kepada pihak berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau konsuler dari

negara asal mereka. Misi diplomatik atau konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya, dokumen untuk kembali ke negaranya.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi oleh Para Pihak.

PASAL 8

AMENDEMENT

Persetujuan ini dapat diamendemen, jika dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis melalui saluran diplomatik. Amendemen dimaksud mulai berlaku pada tanggal diterimanya notifikasi kedua yang mana Para Pihak saling memberitahukan terkait selesainya prosedur internal yang diperlukan oleh masing-masing Pihak untuk pemberlakuan amendemen tersebut.

PASAL 9

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan pelaksanaan Persetujuan ini secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan ketertiban umum, kesehatan publik, keamanan nasional atau karena bencana alam yang serius. Pemberitahuan, serta pengakhiran penangguhan tersebut harus diberitahukan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
2. Penangguhan Persetujuan ini, secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memengaruhi warga negara salah satu Pihak yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah yang telah diberikan izin masuk dan telah berada di wilayah Pihak lainnya menurut Pasal 1 Persetujuan ini pada saat diberlakukannya penangguhan.

PASAL 10

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa segala persyaratan untuk keberlakuan Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan nasionalnya masing-masing, telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini, di Bali, pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
GUINEA EKUATORIAL**



SIMEON OYONO ESONO ANGUE
**MENTERI LUAR NEGERI DAN
KERJA SAMA**



REPUBLIK INDONESIA

**ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
SOBRE
EXENCIÓN RECÍPROCA DEL REQUISITO DE VISADO DE ENTRADA
PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES O
DE SERVICIOS**

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial, en adelante denominados como "Las Partes";

CONSIDERANDO las buenas relaciones de amistad y de Cooperación existentes entre los dos Gobiernos y Pueblos;

DESEOSOS de fortalecer aún más las relaciones de amistad entre los dos países facilitando los movimientos de sus ciudadanos, titulares de pasaportes diplomático y oficial o servicio para entrar en el territorio de cada una de las Partes, en base a los principios de igualdad y reciprocidad;

TENIENDO EN CUENTA la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,

CONFORME a las Leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países;

HAN ACORDADO lo siguiente:

fn

dy

Artículo 1
EXENCION DE VISADO

Los ciudadanos de una de las Partes titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicios en curso de validez, no se les exigirá obtener visado para entrar, transitar y permanecer en el territorio de la otra Parte por un período no superior a los 30 (treinta) días a partir de la fecha de cada entrada.

Artículo 2
DURACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS PASAPORTES

La duración de la validez de los pasaportes diplomáticos y oficiales o servicios de los ciudadanos de una de las Partes, será de al menos 6 (seis) meses antes de su entrada al territorio de la otra Parte.

Artículo 3
**VISADO PARA MIEMBROS DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y
CONSULARES**

Los ciudadanos de una Parte, titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicios en curso de validez, destinados como miembros de la misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluidos los miembros de su familia (el término "miembros de la familia" se refiere a esposo/esposa, hijos no empleados, menores de 25 años de edad y sus padres dependientes) deberán obtener el correspondiente visado de entrada a través de las misiones diplomáticas o consulares, antes de la entrada en el territorio de la otra Parte.

Artículo 4
CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA

Los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicios en curso de validez de las Partes referidos en este Acuerdo, pueden entrar y salir del territorio de la otra Parte, en cualquier punto autorizado para tal fin por las autoridades de inmigración competentes, sin ninguna restricción, excepto las estipuladas en las

disposiciones de seguridad, migratorias, aduaneras, sanitarias y de otro tipo que puedan ser legalmente aplicables a los titulares de dichos pasaportes.

Artículo 5

DERECHOS DE AUTORIDADES

1. El presente Acuerdo no eximirá a los ciudadanos de ninguna de las Partes de la obligación de observar las Leyes y reglamentos de la otra Parte, incluido, lo relativo a la entrada, permanencia y salida de extranjeros.
2. El presente Acuerdo no afecta las Leyes y regulaciones aplicables de los dos países relacionadas con la seguridad interna y la entrada, permanencia o movimiento de extranjeros.
3. Cada una de las partes conserva el derecho de renunciar la entrada o permanencia en su territorio a los titulares de los pasaportes referidos en el Artículo 1 del presente Acuerdo, si los considera indeseable o pueden poner en peligro la paz, el orden público, la salud pública y seguridad nacional.

Artículo 6

EMISIONES DE PASAPORTES O DOCUMENTOS DE VIAJE Y ESPECIMENES

1. Las Partes intercambiarán, especímenes de sus pasaportes diplomático y oficial o de servicio en curso, a través de canales diplomáticos, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la firma de este Acuerdo.
2. En caso de introducción de nuevos pasaportes diplomático, oficial o de servicio, así como la modificación de los existentes, las Partes se informarán por escrito, a través de canales diplomáticos, sobre cualquier cambio y remitirán a la otra Parte el espécimen, a más tardar 30 (treinta) días antes.
3. En caso de que el pasaporte de un ciudadano de una Parte se haya extraviado o estropeado en el territorio de la otra Parte, el titular informará a la autoridad

correspondiente misión diplomática o consular de la Parte del afectado expedirá un nuevo pasaporte o documento de viaje a su ciudadano de conformidad con las Leyes y Reglamentos aplicables y notificará a las autoridades competentes de la Parte receptora.

Artículo 7

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia o disputa que surja de la interpretación o implementación de las disposiciones de este Acuerdo se resolverá amigablemente a través de consultas o negociaciones directas entre las Partes.

Artículo 8

ENMIENDAS

Este Acuerdo puede ser emendado, si se considera necesario, por consentimiento mutuo por escrito a través de canales diplomáticos. Dichas enmiendas entrarán en vigencia en la fecha de recepción de la segunda notificación por la cual las Partes notifiquen a la otra la finalización de los procedimientos internos necesarios para este propósito.

Artículo 9

RENUNCIA

1. Cualquiera de las Partes puede renunciar la implementación de este Acuerdo, total o parcialmente, por razones de orden público, salud pública, seguridad nacional u otros desastres naturales graves. La introducción, así como la suspensión de tales medidas, serán debidamente informadas a la otra Parte a través de canales diplomáticos por adelantado.
2. La suspensión de este Acuerdo, total o parcialmente, no afectará a los nacionales de una Parte que posean pasaportes diplomáticos y de servicio válido a los que se les haya otorgado la entrada y ya estén presentes en el

territorio de la otra Parte de conformidad con el Artículo 1 de este Acuerdo en El punto de suspensión.

Artículo 10

ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

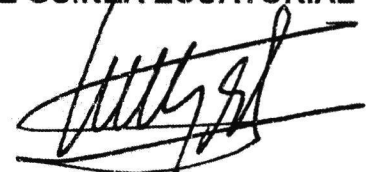
1. El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita por la cual las Partes se informan entre sí, a través de canales diplomáticos, que todos los requisitos para la entrada en vigor de este Acuerdo, según lo estipulado por su respectiva legislación nacional, se han cumplido.
2. TEste Acuerdo permanecerá en vigor por un periodo indefinido, a menos que una de las Partes notifique por escrito y por vía diplomática a la otra su intención de renunciar al mismo. Dicha renuncia surgirá efecto 90 (noventa) días después de la fecha de la notificación a la otra Parte.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, firman el presente acuerdo en Bali, a 21 días de agosto del año dos mil diecinueve, en dos ejemplares originales en los idiomas español, indonesio e inglés, todos los textos siendo igualmente válidos y auténticos. En caso de divergencia en la interpretación de este Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DE INDONESIA**


RETNO L. P. MARSUDI
**MINISTRA DE ASUNTOS
EXTERIORES**

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DE GUINEA ECUATORIAL**


SIMEON OYONO ESONO ANGUE
**MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACION**



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Equatorial Guinea hereinafter referred to as the "Parties";

CONSIDERING the friendly relations and cooperation between the two countries and peoples;

DESIRING to strengthen their friendly relations on reciprocal basis, by facilitating the movement of nationals, holders of diplomatic and official or service passports in the territories of the Parties;

RESPECTING the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

fu

4

Article 1
VISA EXEMPTION

Nationals of either Party holders of valid diplomatic and official or service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit, and stay in the territory of the other Party for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days from the date of each entry.

Article 2
DURATION OF PASSPORTS VALIDITY

The duration of diplomatic and official or service passports validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering into the territory of the other Party.

Article 3
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSIONS

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic and official or service passports and assigned as members of diplomatic or consular missions in the territory of the other Party, including their family members (the term "family members" refers to husband/wife, unmarried and unemployed children under the age of 25 years and dependent parents), shall be required to obtain appropriate entry visa from the ministry of foreign affairs of the other Party through its diplomatic or consular missions, prior to the entry.

Article 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Holders of valid diplomatic and official or service passports of either Party referred to in this Agreement, may enter into and depart from the territory of the other Party, at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory,

customs, sanitary, and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passports.

Article 5

RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to respect the laws and regulations of the other Party when entering into its territory, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.
2. This Agreement does not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, stay or movement of foreigners.
3. The Parties reserve the rights to refuse admission of entry, shorten the duration or end the stay of any persons referred to in Article 1 of this Agreement in its territory, if it considers that person is found to be undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

Article 6

SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange, the specimen of their valid diplomatic and official or service passports through diplomatic channels, within 30 (thirty) days following the signing of this Agreement.
2. In case of introduction of new diplomatic and official or service passports, as well as modifications of the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes and deliver the specimen not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic and official or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately

inform the competent authorities of the receiving country through diplomatic and consular mission of the country of their nationality. The diplomatic and consular mission concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality.

Article 7

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultations or direct negotiations between the Parties.

Article 8

AMENDMENTS

This Agreement may be amended, if deemed necessary, by mutual written consent through diplomatic channels. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the second notification by which the Parties notify the other of the completion of internal procedures necessary for this purpose.

Article 9

SUSPENSION

1. Either Party may suspend the implementation of this Agreement either in whole or in part, with the reasons of public order, public health, national security or serious natural disasters. The introduction, as well as termination of such measures shall be duly informed to the other Party through diplomatic channels in advance.
2. The suspension of this Agreement in whole or in part, shall not affect nationals of a Party holding valid diplomatic and official or service passports who have been granted entry into and are already present in the territory of the other Party under Article 1 of this Agreement at the point of suspension.

Article 10

ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for indefinite period of time, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement, at Bali, on this twenty first day of August in the year two thousand and nineteen, in two originals, each in the Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
EQUATORIAL GUINEA**



SIMEON OYONO ESONO ANGUE
**MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
AND COOPERATION**